

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada PDI Perjuangan dan PK Sejahtera sebagai obyek penelitian tentang Peranan Partai Politik Era Reformasi Terhadap Integrasi Nasional, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Era reformasi ditandai dengan sistem politik multi partai dimana repetisi (pengulangan) politik aliran kembali menemukan bentuknya secara terselubung. Suatu realitas yang menyerupai era demokrasi liberal sebagai suatu kenyataan politik yang begitu sulit mewujudkan stabilitas politik nasional karena pemilu tidak menghasilkan satu partai dominan. Walaupun begitu, parpol tetap melakukan pendidikan dan sosialisasi politik (transformasi nilai), khususnya bagi anggota atau kadernya dalam rangka memperoleh resources yang sesuai dengan kebutuhan platform partai. Ia juga melakukan rekrutmen politik untuk menyediakan resources yang mampu mengelola organisasi agar bisa merebut atau mempertahankan kekuasaan demi memperjuangkan kepentingan partai. Disamping itu, parpol tetap menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi serta melaksanakan partisipasi politik dengan mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk memadukan berbagai kepentingan masyarakat dan memperjuangkannya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Artinya, parpol era reformasi melaksanakan peran integrasi nasional melalui fungsinya sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik serta tetap menjadi sarana artikulasi dan mengagregasi kepentingan. Namun peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional mengalami penurunan kualitas karena perluasan partisipasi masyarakat tidak berbanding lurus dengan kemampuan sumberdaya parpol, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya.

Kedua, sebagai partai terbuka (pluralis), PDI Perjuangan memiliki platform Pancasila 1 Juni 1945. Ia memberikan kesempatan bagi semua masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan untuk bergabung didalamnya. Dengan demikian, PDI Perjuangan menunjang penguatan aspek integrasi nasional. Demikian juga dengan PK Sejahtera. Ia merupakan partai kader yang didasarkan pada agama atau kosmopolitan dengan menetapkan Islam sebagai dasar kebijakan dalam mengelola partai. Namun doktrin tentang *Mahaliyah wa Alamiyah* – yang mengakui fakta-fakta atau kondisi - kondisi lokal, meski tetap dikaitkan dengan dimensi dunia internasional (Islam)

memberikan nuansa berbeda. Apalagi keberadaan PK Sejahtera sebagai partai dakwah memiliki kebutuhan untuk membuka diri pada batas tertentu dengan sumber etis *Mahaiyyah wa Alamiyah*. Jadi PK Sejahtera menjalankan peranan integrasi nasional karena tetap mengikuti kaidah-kaidah demokrasi didalam memperjuangkan tujuannya.

Ketiga, era reformasi merupakan masa transisi yang membutuhkan konsolidasi demokrasi yang lebih substantif. Apalagi euforia politik selama masa transisi telah menjadikan negara pada posisi tidak stabil akibat ledakan partisipasi rakyat yang tidak mampu dikelola oleh institusi politik yang ada. Euforia politik memang dapat memperluas ruang partisipasi dalam proses politik, namun bisa juga melemahkan stabilitas politik nasional, karena “suara rakyat” sebagai sumber legitimasi politik terpecah. Akibatnya, parpol yang duduk dalam sistem politik (berkuasa) adalah partai dengan perolehan suara kurang dari 50 persen sehingga ia perlu membentuk koalisi antar partai guna menjalankan program ditengah kecenderungan ketidakstabilan politik. Jadi kuantitas (jumlah) dan kualitas (sepak terjang) parpol berperan penting terhadap dinamika politik nasional. Hal demikian disadari oleh partai - partai politik era reformasi, bahwa jumlah partai kontestan pemilu harus proporsional agar dapat memberikan stabilitas politik. Memang keberadaan partai dominan untuk mewujudkan ketahanan nasional sangat tergantung pada sifat dan luasnya perpecahan yang ada ditengah heterogenitas bangsa Indonesia. Namun parpol era reformasi melalui kadernya di badan legislatif mulai membuat regulasi jumlah partai melalui pemilu agar bisa menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi ketahanan nasional bersendikan demokrasi. Artinya, parpol era reformasi insyaf akan pentingnya sistem multi partai terbatas (proporsional) dalam rangka konsolidasi demokrasi sehingga tercipta kohesi sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

V.2. Saran

Sehubungan dengan temuan penelitian tersebut diatas, peneliti menyarankan agar peranan parpol era reformasi terhadap integrasi nasional bisa lebih optimal, maka setiap parpol perlu segera berbenah diri dengan meningkatkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat mengelola partisipasi masyarakat dan mampu melembagakan konflik atau kepentingan yang saling bersaing. Oleh sebab itu, parpol juga perlu mengetahui lingkup serta intensitas perbedaan agama dan etnis, kesenjangan antara kelompok tradisional dan kelompok modern, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, termasuk ideologi - Peranan partai politik..., Achmad Suhawi, Pascasarjana-UI, 2008

ideologi yang saling bersaing. Karena semua itu harus diintegrasikan dan diartikulasikan oleh parpol yang eksis dalam pentas politik nasional. Apalagi jumlah parpol selama transisi demokrasi sangat tergantung pada fragmentasi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dengan begitu, parpol era reformasi melalui lembaga legislatif dan eksekutif harus memastikan bahwa ia melaksanakan perannya dalam memperkuat integrasi nasional dimana secara gradual mengurangi etnosentrisme yang mengancam integrasi nasional melalui Undang-undang tentang partai politik dan pemilihan umum.

